

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

KINERJA DAN ANGGARAN

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



TRIWULAN II

2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau Kode Pos 78711
Telp./Fax. (0567)21682 e-Mail : bkd@kapuashulukab.go.id

NOTULA

Hari/tanggal : Rabu, 3 Juli 2023
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Kepala BKAD
Pimpinan rapat : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Notulis : Annisa Pratiwi Bahtiar, S.E.
Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023

1. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 di ruang kerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan dan dihadiri oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur, serta Pejabat Fungsional Tertentu selaku Sub Koordinator di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Adapun hasil rapat dapat dilaporkan sebagai berikut:
 - A. Rapat dibuka dengan pengantar dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,
 - B. Selanjutnya adalah pemaparan dari Sekretaris Badan dan Kepala Bidang tentang capaian sasaran dan kinerja serta realisasi anggaran masing-masing bidang.
 - 1) Pemaparan Bapak Usman, S.E., M.A.P selaku Sekretaris BKAD menyatakan bahwa:
 - a) Capaian untuk sasaran meningkatkan tata kelola administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pelaporan dan penatausahaan aset adalah sebagai berikut:
 - indikator kinerja persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

tercapai 60% dari target tahunan yang ditetapkan.

- indikator kinerja persentase terlaksananya pengadministrasian keuangan perangkat daerah tercapai 49% dari target tahunan yang ditetapkan.
 - indikator kinerja persentase terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah tercapai 0% dari target tahunan yang ditetapkan.
 - indikator kinerja persentase terlaksananya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah tercapai 16% dari target tahunan yang ditetapkan.
 - indikator kinerja persentase terlaksananya pengadministrasian umum perangkat daerah tercapai 39% dari target tahunan yang ditetapkan.
 - indikator kinerja persentase terlaksananya penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tercapai 0% dari target tahunan yang ditetapkan.
 - indikator kinerja persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tercapai 40% dari target tahunan yang ditetapkan.
 - indikator kinerja persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tercapai 50% dari target tahunan yang ditetapkan.
- b) Penyerapan anggaran sekretariat hingga akhir triwulan II telah terealisasi senilai Rp. 2.845.627.926 atau sebesar 37,99% dari total anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Sekretariat senilai Rp. 7.489.492.784.
- c) Adapun kendala yang dihadapi Sekretariat adalah:
- Sampai dengan triwulan II Sekretariat masih belum bisa mencairkan anggaran ATK, bahan komputer, bahan cetak, makan dan minum lapangan dll yang pengadaannya melalui metode *e-purchasing*. Berdasarkan hasil penelusuran ke pejabat pembuat komitmen (PPKom), kendala utamanya

adalah karena pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, maupun pihak penyedia belum familier dengan metode *e-purchasing*. PP, PPKom, dan bendahara pengeluaran sudah melakukan konsultasi ke UKPBJ Kabupaten Kapuas Hulu terkait tahapan pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, akan tetapi pada kenyataannya untuk mempelajari cara pengadaan dengan metode tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang mengingat PP maupun PPKom memiliki tugas utama lain sesuai dengan jabatannya masing-masing. Selain itu, pihak penyedia juga mengaku kesulitan untuk mengakses LPSE karena hampir semua penyedia yang akan dipilih tidak memiliki admin.

- Sekretariat BKAD telah menyampaikan surat permohonan permintaan tenaga ASN tambahan untuk membantu urusan perencanaan dan evaluasi, tetapi hingga saat ini belum ada tenaga baru yang ditempatkan di BKAD sesuai dengan permohonan.
- 2) Dari Bapak Petrus Supianto, S.Kom., selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan disampaikan laporan sebagai berikut:
- a) Ketiga indikator untuk pemenuhan dokumen dapat disiapkan sesuai dengan target tahunan sasaran yaitu 50%.
 - b) Anggaran untuk Progam Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi tupoksi Bidang Anggaran dan Perbendaharaan adalah 14,47% atau Rp. 52.218.411.038 dari total anggaran Rp. 360.898.356.987.
 - c) Kendala yang dihadapi selama triwulan II:
 - Masih ada beberapa PD yang belum memahami tentang mekanisme pengusulan dan penerapan Standar Satuan Harga dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 3) Dari Ibu Agusninawati, SE., Ak., MM, selaku kepala Bidang Akuntansi disampaikan laporan sebagai berikut:
- a) Untuk indikator Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Tepat Waktu yaitu pengumpulan

Laporan Keuangan SKPD merupakan pemenuhan Penyusunan Konsolidasi LKPD sesuai jadwal yang ditetapkan.

b) Realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar 26,42% atau Rp. 181.741.491 dari total anggaran Rp. 687.868.774.

4) Dari Bapak Jeki, SE., M.Ec.Dev selaku Kepala Bidang Aset Daerah disampaikan laporan sebagai berikut:

a) Sampai dengan akhir Juni 2023, sertifikat tanah (milik Kabupaten Kapuas Hulu) yang telah diajukan ke BPN sebanyak 50 usulan. Dokumen penilaian yang telah diterbitkan sebanyak 5 dokumen.

b) Untuk anggaran sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 37,75% dari total anggaran yaitu Rp. 496.570.117 dari Rp. 1.315.521.248.

c) Permasalahan yang dihadapi:

- Pada triwulan II usulan pembuatan sertifikat tanah yang disampaikan ke BPN sejumlah 10 (sepuluh) usulan. Hambatan dalam proses pengusulan pembuatan sertifikat tanah yaitu kurangnya dokumen pendukung bukti kepemilikan atas tanah.
- Masih adanya pengurus barang yang kurang memahami dan kurang perhatian terkait wewenang dan tanggungjawab barang yang dikelolanya sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam melakukan rekonsiliasi aset.

C. Dari data yang telah dipaparkan di atas, pada triwulan II tahun 2023 ini diperoleh hasil realisasi indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kapuas Hulu sebagai berikut:

1) Capaian sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang ditargetkan 25,01 dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah yang ditargetkan "BB" pada triwulan II masih belum dapat disajikan karena merupakan proses berkelanjutan hingga dilaksanakan PMPRB dan evaluasi serta penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

2) Capaian sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Daerah di triwulan II untuk indikator kinerja Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan telah dicapai sebesar 50% dari total target yang ditetapkan.

- 3) Capaian sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk indikator kinerja Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada triwulan II belum dapat disajikan karena merupakan proses berkelanjutan sampai dengan tahun anggaran berjalan berakhir.
 - 4) Capaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk indikator Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 45,46% dan masih merupakan proses berkelanjutan dan terus ditingkatkan pada triwulan berikutnya sesuai peraturan yang berlaku.
- D. Evaluasi Kepala Badan terhadap capaian kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut:
- 1) Agar PPKom, PP, bersama-sama dengan penyedia mengonsultasikan kendala dalam memahami metode *e-purchasing* ke UKPBJ. Upayakan semaksimal mungkin untuk memilih metode *e-purchasing* untuk penyediaan barang dan jasa kecuali apabila barang dan jasa tersebut tidak tersedia di e-katalog, atau harga yang tertera di e-katalog melebihi harga apabila menggunakan metode pengadaan langsung. Segera realisasikan anggaran belanja operasional untuk barang persediaan seperti ATK, bahan komputer, bahan cetak, makan minum, dan juga belanja modal.
 - 2) Untuk mengatasi kekurangan pegawai, sementara waktu sampai dengan tersedia tenaga ASN tambahan agar masing-masing sub koordinator dan staf saling membantu dan berbagi pekerjaan.
 - 3) Untuk mekanisme pengusulan standar satuan harga, sediakan tutorial cara pengajuan ke SIPD. Selain itu, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan tetap mengawal PD dalam pengusulan standar harga dan selalu memeriksa bukti dukung yang disertakan dalam

pengusulan.

- 4) Untuk kendala dokumen kepemilikan yang masih kurang sebagai syarat pengusulan sertifikat tanah, lakukan koordinasi dengan pihak setempat lokasi tanah berada dan/atau kepada ahli waris khusus tanah hibah dari masyarakat.
- 5) Pada saat rekonsiliasi, maupun melalui grup daring sampaikan kepada pengurus barang agar dapat memperhatikan tanggungjawab sebagai pengurus barang dan melakukan rekonsiliasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan setiap triwulannya. Rekonsiliasi yang dilakukan secara berkala dan tepat waktu dapat mempermudah dalam pencocokan data asset antara PD dengan Bidang Aset Daerah.
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD untuk 5 tahun ke depan yaitu:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

TUJUAN RPJMD	SASARAN BKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	n/a	25,01	28	31	34	37
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Huruf	BB	BB	BB	BB	BB	A
2. Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	Persen	n/a	100	100	100	100	100
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persen	n/a	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	Persen	n/a	60	62	64	66	68

E. Catatan Sekretariat dan Bidang BKAD kedepannya:

- 1) agar dalam pelaksanaan selalu mengacu ke peraturan yang ditetapkan, sehingga kedepannya tidak mengalami kendala,
- 2) agar penertiban dokumen pertanggungjawaban dilengkapi dan tepat waktu.

Mengetahui Pimpinan Rapat :
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007

Notulis,



ANNISA PRATIWI BAHTIAR, S.E.
Penata Muda
NIP. 19950630 202012 2 018

PENGUKURAN KINERJA KEPALA BADAN TRIWULAN II TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			ANGGARAN	REALISASI TW 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah BKAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	1. Nilai Reformasi Birokrasi	25,01	-	-			0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.489.492.784	2.845.627.926	37,99
			2. Predikat Sakip	BB	-	-			0				
2	Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang tepat Waktu dan sesuai Dengan Ketentuan Perundangan	100%	25%	25%			50%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	361.586.225.761	52.400.152.529	14,49
			2. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	-	-			0%				
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang dilaksanakan secara tertib	62%	35,54%	9,92%			45,46%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.315.521.248	496.570.117	37,75
J U M L A H											370.391.239.793	55.742.350.572	15,05

Putussibau, 3 Juli 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007

REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	1 2 Nilai Evaluasi RB PD Predikat SAKIP PD	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.999.718	-	-	-	-	0	DAU
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.372.170	-	-	-	-	0	DAU
				3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.596.725	-	-	-	-	0	DAU
				4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.511.475	-	-	-	-	0	DAU
				5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.998.990	-	-	-	-	0	DAU
				6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	12.734.475	-	-	-	-	0	DAU
				7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.733.920	-	-	-	-	0	DAU
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.893.543.936	-	-	-	1.864.381.416	48	DAU
				2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.514.360	-	-	-	-	0	DAU
				3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	374.940.000	-	-	-	190.020.000	51	DAU
				4 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	28.664.085	-	-	-	-	0	DAU
				5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.961.020	-	-	-	-	0	DAU
			3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Pembinaan Pengawasan dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.714.405	-	-	-	-	0	DAU
				2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.732.590	-	-	-	-	0	DAU

					4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya	141.525.000	-	-	-	-	0	DAU
							2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.254.305	-	-	-	225.000.000	45	DAU
							3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsi	267.805.000	-	-	-	-	0	DAU
					5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.214.000	-	-	-	-	0	DAU
							2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.344.422	167.594.000	-	-	6.928.731	4	DAU
							3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.977.060	-	-	-	-	0	DAU
							4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.820.000	-	-	-	3.120.000	35	DAU
							5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.000.000	-	-	-	-	0	DAU
							6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.822.000	-	-	-	386.217.257	70	DAU
							7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	23.100.000	-	-	-	19.000.000	82	DAU
					6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	162.158.800	-	-	-	0	DAU
					7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.410.000	-	-	-	450.000	4	DAU
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.800.000	-	-	-	62.404.942	35	DAU
							3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.050.000	-	-	-	-	0	DAU
							4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	381.789.635	-	-	-	26.227.580	7	DAU
					8	Pemeliharaan Barang Milik	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	309.588.500	-	-	-	59.838.000	19	DAU

						Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.945.100	-	-	-	2.040.000	15	DAU	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang secara tepat waktu sesuai dengan Ketentuan Perundangan	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	55.910.000	-	-	-	-	0	DAU
						2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	55.204.500	-	-	-	-	0	DAU		
						3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.794.500	-	-	-	-	0	DAU		
						4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.321.000	-	-	-	-	0	DAU		
						5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	189.897.480	-	-	-	5.963.800	3	DAU		
						6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	246.816.045	-	-	-	-	0	DAU		
						7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24.873.500	-	-	-	-	0	DAU		
						8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	96.065.000	-	-	-	65.846.800	69	DAU		
					2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	110.642.000	-	-	-	39.375.200	36	DAU	
						2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga	72.625.700	-	-	-	27.525.200	38	DAU		

[illegible]

							tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
						5	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	256.297.605	-	-	-	119.765.000	47	DAU
Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Penyusunan Standar Harga	35.497.673	-	-	-	-	0	DAU
							2 Penatausahaan Barang Milik Daerah	340.561.845	-	-	-	181.670.000	53	DAU
							3 Pengamanan Barang Milik Daerah	450.080.725	61.600.000	-	-	137.255.720	27	DAU
							4 Penilaian Barang Milik Daerah	182.523.970	-	-	-	44.658.799	24	DAU
							5 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	245.257.035	-	-	-	132.985.598	54	DAU
Total								14.534.601.016	391.352.800	351.502.048.000	3.960.455.200	55.742.350.572	15	

Putussibau, 3 Juli 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

 **AZMI, S.E., MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
1		2		3		4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	6	75	DAU
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	DAU
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	DAU
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	DAU
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	DAU
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	3	75	DAU
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2	50	DAU
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33/12	33/6	50	DAU
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	0	0	DAU
				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	4	33	DAU
				4	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	DAU
				5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	0	0	DAU

		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Pembinaan Pengawasan dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	DAU
				2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	DAU
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	DAU
				2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	6	50	DAU
				3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	21	0	0	DAU
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	DAU
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	20	DAU
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	DAU
				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	2	33	DAU
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	DAU
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6	50	DAU
				7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	5	50	DAU
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	0	0	DAU
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	0	0	DAU
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5	50	DAU
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	0	0	DAU

		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	4	44	DAU
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	50	DAU
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	50	DAU
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	100	DAU
				2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	0	0	DAU
				3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	50	50	100	DAU
				4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	50	0	0	DAU
				5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	0	0	DAU
				6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	0	0	DAU
				7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	9	7	78	DAU
				8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	6	4	67	DAU
		2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	103	39	38	DAU
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Laporan	12	6	50	DAU

					Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
			3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	6	50	DAU
			4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	11	6	55	DAU
	3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	3	2	67	DAU
			2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	-	0	DAU
			3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	2	1	50	DAU
	4	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	4	-	0	DAU
	5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	50	-	0	DAU
			2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	2	1	50	DAU
			3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	1	100	DAU
			4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	DAU

				tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
			5	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	50	50	100	DAU
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	100	DAU
			2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	50	50	100	DAU
			3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	100	50	50	DAU
			4	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	15	5	33	DAU
			5	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	50	50	100	DAU
Total							1142	581	52	

Putussibau, 3 Juli 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

 **A. Z. M. I. S. E., MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317/199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau Kode Pos 78711
Telp./Fax. (0567) 21682 e-Mail : bkd@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 27 Juni 2023

Nomor : 050/ 053 /BKAD/SET
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. Kepala Bidang, Kasubbag Umum
dan Aparatur, dan Sub Koordinator
di Lingkungan Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu

di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran triwulan II tahun 2023, melalui surat ini dimohon kehadiran Saudara/i pada kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala BKAD

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara/i menyiapkan data dan bahan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing bidang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007

**Dokumentasi Rapat Monitoring Dan Evaluasi
Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Danau Luar No. 02 Putussibau 78711 Telp/Fax. (0567) 21682
Telp/Fax (0567) 21682 e-Mail bkad@kapuashulu.go.id

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Azmi	Ka BKAD	1	
2	Usman	Subban	2	
3	Petrus Suprianto	Ket. Ang.	3	
4	Aguminiawati	Ket. Sek. Um.	4	
5	Ichi, SE		5	
6	Dr. Sahri	Sub. koord. Kesda	6	
7	Haliminsyah		7	
8	Dwi Dharmawan	Sub koord. Ang	8	
9	Rahmawati		9	
10	Dumaceli	Pabik. B. & A. S. D.	10	
11	M. Pamboromazore	Sub. koord. P. & B. S. D.	11	
12	Anghil Wilbur F.	Anal. Keuangan Pusat & Daerah	12	
13	Nazarine Haris	Anal. Keuangan Pusat & Daerah	13	
14	Nuraira Rahmi	Kasubag Umpan	14	
15	Annisa P.R.	Staf	15	
16	Sabinus Beji		16	
17			17	
18			18	
19			19	
20			20	
21			21	
22			22	
23			23	
24			24	
25			25	

Putussibau, Juli 2023
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

AZMI, SE, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007